



IDN/ANTARA

### PEKERJA LEPAS JASA LIPAT SUARA PEMILU 2024

Petugas KPU Kota Depok memeriksa pekerja lepas saat memasuki gedung untuk melipat surat suara Pemilu di gudang KPU Kota Depok, Cibinong, Kab. Bogor, Jabar, Rabu (10/1). KPU Kota Depok setempat mempekerjakan 300 orang warga untuk melipat sekaligus mensortir surat suara Pemilu 2024 dengan honor Rp509 per surat suara.

JIKA SERING BOLOS DI JAM KERJA

## Pj Gubernur Banten Ancam Potong Tukin Pejabat Pemrov

Ketentuan pemotongan Tukin bagi pejabat yang lalai dalam bekerja sudah diterapkan. Tujuannya, agar program yang dicanangkan di 2024 dapat tercapai dan bisa dinikmati masyarakat hasilnya. Karena teori prinsip dasar dalam bekerja bisa dilihat mulai dari hal yang terkecil, kata Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.

**SERANG (IM)-** Kemajuan daerah Provinsi Banten ditentukan dengan keseriusan pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini menjadi atensi bagi Pj Gubernur

Banten, Al Muktabar. Tujuannya, agar program yang dicanangkan di 2024 dapat tercapai dan bisa dinikmati masyarakat hasilnya. Untuk itu, Al tak segan

memotong tunjangan kinerja (Tukin) para pejabat di Pemrov Banten yang ketahuan kerap bolos kerja.

Menurutnya, pejabat yang kerap bolos dan lalai dalam melaksanakan tugasnya akan diberi sanksi pemotongan Tukin.

Bahkan fasilitas umum tak diperhatikan pun, menjadi indikator pimpinan di instansi dalam bekerja.

"Bahwa tidak masuk itu efeknya kepada Tukin, saya ingin diterapkan itu. Kan saya keliling setiap pagi, kebersihannya, kamar

mandinya, semua dibersihkan, itu kinerja kepala dinas loh," katanya, Rabu (10/1).

Ia menjelaskan, teori prinsip dasar dalam bekerja bisa dilihat mulai dari hal yang terkecil. Sehingga itu akan berdampak pada kesuksesan bekerja.

"Ada beberapa teori prinsip dasar suksesnya kerja, konsistensi kerja sesuatu yang bernilai kepada hal yang lain ke yang lebih besar lagi. itu harus dijaga dan ada biayanya," jelasnya.

Ia menerangkan, ada ketentuan khusus yang telah diatur persentase pemotongan Tukin bagi

pejabat yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

"Ada ketentuannya (besaran pemotongan), ada aturannya, per hari berapa persen, itu ada," terangnya.

Ia menyampaikan, ketentuan pemotongan Tukin bagi pejabat yang lalai dalam bekerja sudah diterapkan.

Namun pihaknya tidak hafal secara detail jumlah pejabat yang telah disanksi pemotongan Tukin. "Sudah diterapkan, saya keliling itu saya cocokan. Nanti kita lihat (data pejabat diberi sanksi) berapa yang dipotong (Tukin)," tutupnya. ● **pra**

## Pembangunan Flyover Cisauk Dibiayai APBD Kab. Tangerang Rp200 Miliar

**TANGERANG (IM)-** Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid mengatakan pembangunan flyover Cisauk sepenuhnya dibiayai APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp 200 miliar.

"Biaya pembebasan lahan maupun fisiknya murni menggunakan dana APBD Kabupaten Tangerang tanpa bantuan dana pemerintah pusat," ujar Maesyal, Rabu (10/1).

Maesyal mengatakan, semua biaya pembangunan jembatan layang itu direncanakan ditanggung bersama dengan pemerintah pusat. "Awalnya Pemda hanya membebaskan lahannya saja, biaya pembangunan fisiknya oleh Kementerian APBD," kata Maesyal.

Namun, ketika Pemkab Tangerang telah membuat kajian dan menuntaskan pembebasan lahan pada 2020-2021, pemerintah pusat tidak bisa mendanai pembangunan flyover Cisauk karena refocusing anggaran dampak pandemi Covid-19.

"Sementara flyover sudah mendesak untuk dibangun karena menjadi satu-satunya solusi kemacetan di Cisauk," kata Maesal.

Bupati Tangerang saat itu, Ahmed Zaki Iskandar meminta Maesal melakukan kajian dan perhitungan kemungkinan pembangunan fisik jembatan layang itu dibiayai APBD. "Saya langsung melakukan perintah pak Bupati itu dengan melibatkan seluruh instansi terkait, hasilnya sangat memungkinkan APBD menanggung biaya konstruksi flyover dengan mekanisme multiyears," kata Maesal.

Pemkab Tangerang mengajukan anggaran pembangunan flyover ke DPRD Kabupaten Tangerang yang akhirnya menyetujui anggaran tersebut.

Pada November 2022, konstruksi flyover dimulai dengan waktu kerja lebih dari 350 hari. Akhir Desember 2023, flyover rampung dan langsung diuji coba. "Ternyata keputusan Bupati Zaki saat itu sangat tepat, flyover sudah beroperasi, masyarakat langsung merasakan dampak positifnya," kata Maesyal.

Jembatan layang yang memiliki panjang 1,09 kilometer, panjang jembatan 525 meter dengan dua lajur masing-masing memiliki lebar 5,5 meter telah dioperasikan secara penuh dalam beberapa hari terakhir ini.

"Alhamdulillah kemacetan bisa diurai, masyarakat sudah merasakan dengan adanya pembangunan dari Flyover Cisauk ini," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah.

Iwan menyebutkan, flyover Cisauk adalah proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.

Jembatan layang Cisauk dibiayai seluruhnya dari APBD Kabupaten Tangerang baik untuk pembebasan lahan maupun biaya konstruksinya. "Kurang lebih Rp 200 miliar, multi-years dua tahun anggaran 2022 dan 2023," kata Iwan.

Proses pembebasan lahan dilakukan tahun 2020 sampai 2022, dan pembangunan fisik dimulai November 2022 dan selesai pembangunan Desember 2023.

Jembatan layang Cisauk merupakan salah satu program Tangerang bebas macet yang digagas Pemerintah Kabupaten Tangerang. Jembatan layang ini juga untuk mendukung optimalisasi stasiun KRL Cisauk dan kawasan Transit Oriented Development (TOD). ● **pp**

## Pj Bupati Bogor Bersilaturahmi dengan Alim Ulama

**BOGOR (IM)-** Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu bersilaturahmi dengan para Alim Ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat lingkup Kabupaten Bogor. Hal ini untuk membangun kolaborasi dalam menciptakan pesta demokrasi damai dan terciptanya kondusifitas di wilayah Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Gedung Serbaguna I Setda, Selasa (9/1).

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menyampaikan, Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia beragam tantangan seperti dinamika sosial, politik, ekonomi serta isu keumatan perlu dihadapi bersama melalui kolaborasi dan sinergi terutama dengan Umaro dan ulama Kabupaten Bogor.

"Umaro dan ulama perlu membangun kolaborasi bekerjasama untuk duduk bersama-sama agar isu keumatan bisa tertangani dengan baik. Untuk itu solidaritas dan soliditas perlu diperkuat oleh segenap stakeholder baik Pemerintah Kabupaten Bogor, kelompok, alim ula-

ma, kyai dan masyarakat," terangnya.

Menurut Asmawa, pertemuan hari ini dibalut dalam bentuk silaturahmi, bertujuan agar ulama dan umaro bersama-sama dengan Pemkab Bogor dalam menjawab tantangan guna menciptakan kondusifitas masyarakat Kabupaten Bogor.

Katanya, bagi Pemkab Bogor kekuatan moral spiritual jadi modal dasar dalam melaksanakan pembangunan termasuk pemerintahan, karena ulama dan pemerintah bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk menguatkan menyatukan umat dan memelihara masyarakat dan negara.

"Mudah-mudahan dengan pertemuan ini solidaritas, soliditas dan kekompatan antara ulama umara dan seluruh stakeholder di Kabupaten Bogor bisa semakin kita tingkatkan," tegasnya.

Pj. Bupati Bogor juga berharap silaturahmi hari ini jadi momentum awal yang baik bagi Pemkab Bogor terutama untuk memperkuat ukhuwah islamiyah saling menghargai dan saling menghormati.

Kemudian, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspekkesra) Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari mengatakan, kegiatan hari ini dilakukan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara ulama dan umara dalam mendorong pembangunan Kabupaten Bogor selama kepemimpinan Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu.

"Juga untuk meningkatkan kerjasama dalam menciptakan suasana kondusif wilayah Kabupaten Bogor. Terlebih dalam waktu dekat kita akan menghadapi Pemilu serentak, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama," tandas Aspekkesra.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni, para kyai dan alim ulama, perwakilan pimpinan ormas Islam di Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, Perwakilan Forkopimda, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Ketua Baznas Kabupaten Bogor, Ketua BPIC Kabupaten Bogor, tokoh masyarakat dan lainnya. ● **gio**



Silaturahmi alim ulama dengan Pj Bupati Bogor, untuk menciptakan pemilu berjalan kondusif di wilayah Kabupaten Bogor.

## Pupuk Subsidi untuk Petani di Kab. Tangerang Jadi Prioritas

**TANGERANG (IM)-** Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno menyebut pihaknya terus mengupayakan bantuan pupuk subsidi untuk para petani di Kabupaten Tangerang. "Kami akan terus berusaha untuk membantu memenuhi kebutuhan pupuk bagi para petani," ujarnya, Rabu (10/1).

Kata Asep, salah satunya dengan mencari distributor lain yang menjual pupuk dengan harga di bawah standar kepada para petani dengan kualitas baik "Jadi, hal tersebut merupakan langkah untuk membantu para petani agar cepat mendapatkan pupuk dengan harga ekonomis," jelasnya.

Selain itu, kata Asep, DPKP terus mengupayakan pemanfaatan pupuk

organik cair untuk memenuhi kekurangan pupuk bersubsidi.

"Pupuk organik cair ini sudah kita lakukan demplot di beberapa tempat dan ternyata penggunaan pupuk ini bisa menekan biaya operasional para petani dan juga menghasilkan padi yang maksimal dengan kualitas yang baik," terangnya.

Sebelumnya, kata Asep, pihaknya telah mengusulkan bantuan pupuk subsidi kepada pemerintah pusat sebesar 13.000 ton, tetapi bantuan yang diberikan hanya sebesar 7.000 ton sehingga masih banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.

Untuk itu, pihaknya akan tetap terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat Kementan terkait penambahan pupuk subsidi tersebut. ● **pp**

## Benyamin Serahkan Puluhan Sertifikat Tanah Milik Warga

**TANGSEL (IM)-** Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama Kantor Pertanahan Kota Tangsel menyerahkan puluhan sertifikat tanah hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat. Penyerahan sertifikat itu dilakukan Wali Kota Benyamin Davnie bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Shinta Purwitasari, Kepala Kantor Wilayah BPN Banten Sudaryanto, beserta unsur Forkopimda di Aula Blandongan Puspemkot Tangsel, Selasa (9/1).

"Melalui kerja sama yang erat dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan, kita telah berhasil mengambil langkah besar dalam memastikan semua warga memiliki kepastian atas tanah yang mereka tempati," ucap Benyamin dalam sambutannya.

Disampaikan olehnya, pada 2024, ditargetkan menyelesaikan 1.423 bidang dalam program ini. Pemberkasan hingga hari ini telah selesai mencapai 100%. "Capaian ini adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi dari semua pihak yang terlibat. PTSL telah tersebar di seluruh penjuru kota kita, mencakup 7 kecamatan, 49 kelurahan. Tinggal sisa 5 lagi kelurahan," ujarnya.

Di kesempatan itu pula Benyamin sempat berbincang dengan salah satu warga penerima manfaat program PTSL, Nafsiah. Benyamin bertanya bagaimana perasaan Nafsiah telah menerima sertipikat tanah. "Bagaimana bu senang, udah ada sertipikat-

nya? Jangan disekolahkan ya bu. Dengan penyerahan ini, nanti Ibu Nafsiah telah mendapatkan kepastian hukum," tanya Benyamin. "Alhamdulillah pak senang, ya pak," jawabnya.

Sementara itu, disampailkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Shinta Purwitasari kegiatan ini merupakan lanjutan dari penyerahan sertipikat PTSL yang dilakukan Presiden pada 2023. "Pagi ini, kita menyerahkan 97 masyarakat penerima sertipikat di Tangerang Selatan, melanjutkan penyerahan sertipikat dari Presiden tahun lalu yang kita kirim sebanyak 23 orang perwakilan dari Tangsel ke istana," paparnya.

Tidak hanya bagi masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan juga menyerahkan sebanyak 52 sertipikat aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan. "Secanggih jumlah bidang aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan ditargetkan sebanyak 862 bidang, dengan jumlah yang sudah terdaftar di kami 206 bidang," jelasnya.

Lebih lanjut, berbagai program tengah dijalankan dan digencarkan oleh Kantah Tangsel, termasuk digitalisasi hampir di semua pelayanan. "Di antaranya bahwa adanya program sultan untuk sarana konsultasi secara daring. Bergabungnya juga Kantah Tangsel di Mal Pelayanan Publik, lalu ada Pelayanan, pelayanan tanah akhir pekan yang dilaksanakan khusus untuk pemohon langsung di hari Sabtu dan Minggu," ujar Shinta. ● **pp**

IDN/ANTARA



### PAMERAN LUKISAN DENGAN MEDIA TIRAI

Pengunjung melihat karya lukisan yang dipajang dalam pameran bertajuk "Tirai For Interconnection" di Galeri Raos, Batu, Jatim, Rabu (10/1). Pameran yang menampilkan 36 lukisan dengan media kain tirai tersebut diikuti puluhan seniman terpilih dari berbagai daerah serta berlangsung hingga tanggal 30 Januari.

## Bawaslu Telusuri Dugaan Guru Jadi Times Capres di Kabupaten Serang

**SERANG (IM)-** Bawaslu Banten menelusuri informasi sejumlah guru di Kabupaten Serang yang menjadi tim sukses dan koordinator desa untuk salah satu pasangan calon presiden.

Bawaslu Banten telah meminta untuk Bawaslu Kabupaten Serang untuk melakukan penelusuran tersebut. "Kita lagi coba koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Serang ya, informasi baru didapat langsung ditindaklanjuti, langsung koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Serang untuk melakukan penelusuran," kata Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal kepada wartawan di Serang, Rabu (10/1).

Bawaslu mengaku belum mendapat laporan terkait dugaan itu. Namun dia melakukan penelusuran atau menjemput bola dari laporan di media. "Laporan secara resmi belum ada, kami hanya mengetahui informasi awal dari media. Nah oleh karenanya kita berangkat dari situ," jelasnya.

Menurut Ali, guru baik yang berstatus ASN atau honorer terikat pada aturan netralitas selama Pemilu 2024. Dia meminta guru tetap harus bersikap netral. "Honorar menggunakan dana apa selama ini APBD atau APBN, ya disamakan, jadi dia harus netral apalagi dia menggunakan baju yang sama dengan PNS pada umumnya, jadi tetap dia terikat pada netralitas," jelasnya.

Ali menambahkan selama masa kampanye ini, paling banyak dugaan pelanggaran netralitas dilakukan ASN dan kepala desa. Pelanggaran baru ditemukan di Pandeglang bahkan sudah ada yang diputuskan oleh Komisi ASN.

Pelanggaran lain terbanyak adalah pemasangan alat peraga kampanye di lokasi-lokasi dilarang. "Pidana pemilu belum ada sampai saat ini, kemudian etik juga belum ada, jadi masih baru ada terkait netralitas. Ada di Pandeglang itu sudah kami rekomendasikan ke komisi ASN ada dua," jelasnya. ● **pra**